

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak untuk semua anak dan hal ini telah tercantum dalam berbagai instrument internasional mulai dari Deklarasi Universal 1948. Instrumen-instrumen selanjutnya menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tertentu, termasuk anak penyandang cacat, sangat rentan untuk dikepinggirkan (Sue Stubbs, 2002).

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. Banyak kajian menyatakan tentang besarnya suatu bangsa dikarenakan pendidikan. Pendidikan memiliki hubungan dengan sumber daya manusia dengan kualitas dan kemajuan suatu bangsa yang adil dan makmur. Pendidikan yang merata, bermutu dan relevan merupakan salah satu pendidikan yang mengembangkan dan memfasilitasi perubahan.

UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 tentang Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional mengatakan bahwa: "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Selama beberapa dasawarsa setelah ditetapkan Deklarasi Universal, terdapat banyak upaya yang dilakukan untuk mencapai pendidikan universal. Pada Deklarasi Dunia Jomtien tentang Pendidikan untuk Semua di Thailand tahun 1990 menyatakan pada pasal III tentang Universalisasi Akses dan Mempromosikan Kesetaraan dimana dinyatakan bahwa terdapat kesenjangan pendidikan dan bahwa kelompok tertentu rentan akan diskriminasi dan eksklusi. Hal ini mencakup anak perempuan, orang miskin, anak jalanan, anak pekerja, penduduk perdesaan dan daerah terpencil, etnik minoritas dan kelompok-kelompok lainnya. Sebuah komitmen aktif harus dibuat untuk menghilangkan kesenjangan pendidikan.

Pada tahun 1994 terdapat konferensi Salamanca di Spanyol fokus pada keberagaman karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak. Pada pasal II Salamanca menyatakan bahwa sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan cara paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang terbuka, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua dimana sekolah inklusif memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi sehingga menekan biaya pada keseluruhan sistem pendidikan.

Forum Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal (2000), menekankan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya berjanji untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, inklusif dan dilengkapi dengan sumber-sumber yang memadai, yang kondusif untuk kegiatan belajar dengan tingkat pencapaian yang didefinisikan secara jelas untuk semua. Sistem pendidikan harus inklusif dimana secara aktif mencari anak yang bersekolah dan merespon secara fleksibel terhadap keadaan dan kebutuhan semua siswa.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki

kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pengembangan sekolah bagi anak berkebutuhan khusus di Boyolali sangat baik dimana penyelenggaraan program pendidikan inklusif atau pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan layanan khusus di Kabupaten Boyolali, telah disertai payung hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) No 54/2012 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Kabupaten Boyolali dicanangkan sebagai kabupaten Pelopor Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional. Saat ini jumlah sekolah inklusi di Kabupaten Boyolali sebanyak 80 sekolah yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan di kabupaten Boyolali. Bagi Anak Berkebutuhan Khusus tersebut terdiri 75 SD, 3 SMP, 1 SMA dan 1 SMK (Sumber : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2013).

Pengembangan sekolah inklusi di Boyolali pada saat ini berkembang dimana peralihan sekolah regular menjadi sekolah dengan menggunakan sistem pendidikan inklusif dimana hal ini tidak disertai dengan sarana dan prasarana yang mampu menunjang segala jenis kebutuhan aktual dari anak.

Dari fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa sekolah inklusi yang telah ada di Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya mampu menunjang segala kebutuhan aktual dari anak. diperlukan suatu sekolah inklusi dimana sekolah inklusi merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif dimana dapat menciptakan sekolah yang responsive terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai yaitu merumuskan pokok pikiran sebagai suatu landasan konseptual perencanaan dan perancangan Sekolah Inklusi di Kabupaten Boyolali yang representatif dan akomodatif ditinjau dari segi pemenuhan kebutuhan pendidikan sekolah bagi semua masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitas pendidikan yang lengkap dan mampu mengoptimalkan dan menunjang siswa dalam menerima proses pembelajaran dimana sistemlah yang mengikuti kemampuan siswa. Selanjutnya lingkup penerimaan siswa dari Sekolah Inklusi ini adalah lingkup sekala kabupaten, dimana hanya menerima siswa dari Kabupaten Boyolali saja.

1.2.2. Sasaran

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan Sekolah Inklusi di Kabupaten Boyolali berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan.

1.3. Manfaat

1.3.1. Manfaat secara Subyektif

- Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

- Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya, dalam penyusunan LP3A merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tugas Akhir.

1.3.2. Manfaat secara Objektif

- Memberikan pilihan sekolah yang telah menerapkan pendidikan universal yang efektif dimana dapat menciptakan sekolah yang responsive terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat.
- Memberikan jaminan kepada siswa-siswa Sekolah Inklusi di Boyolali untuk dapat memperoleh pendidikan secara optimal dan tanpa perbedaan akan keberagaman.
- Menjadi salah satu pertimbangan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Boyolali pada khususnya.
- Serta sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang arsitektur.

1.4. Ruang Lingkup Pembahasan

1.4.1. Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansial merupakan pendekatan terhadap nilai-nilai perancangan. Biasanya tidak berwujud karena merupakan suatu konsep perancangan. Dalam hal ini mencakup perencanaan dan perancangan multi building atau bangunan bermassa jamak pada bangunan Sekolah Inklusi di Kabupaten Boyolali yang memenuhi kebutuhan fasilitas, sarana, dan prasarana bagi generasi muda dalam menuntut ilmu di jenjang pendidikan Sekolah.

Pembahasan materi berdasarkan pada aktivitas pendidikan dan hal lain yang berhubungan dalam perencanaan dan perancangan kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan aspek-aspek yang ada dalam arsitektur, yaitu aspek fungsional, kontekstual, arsitektural, kinerja, dan teknis.

1.4.2. Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup spasial merupakan pendekatan perancangan yang nyata, seperti site, sirkulasi dan ruang. Secara spasial, perencanaan dan perancangan Sekolah Inklusi di Boyolali.

1.5. Metode Penulisan

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan Sekolah Inklusi di Boyolali ini adalah metode deskriptif komparatif karena dalam menyusun landasan ini membandingkan sesuatu untuk dimasukkan dalam proses perancangan nantinya. Metode ini memaparkan, menguraikan dan menjelaskan mengenai *design requirement* (persyaratan dan faktor-faktor yang dibutuhkan dalam sebuah desain) dan *design determinant* (ketentuan dan faktor-faktor yang membatasi dan mengatur sebuah desain) terhadap perancangan Sekolah Inklusi di Boyolali adalah :

- Aktivitas dan pelaku yang akan menempati bangunan Sekolah Inklusi di Boyolali
- Site alternative untuk bangunan Sekolah Inklusi di Boyolali

Berdasarkan *design requirement* dan *design determinant* inilah nantinya akan ditelusuri data yang diperlukan. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisa lebih

mendalam sesuai dengan criteria yang akan dibahas. Dari hasil penganalisaan inilah nantinya akan didapat suatu kesimpulan, batasan dan juga anggapan secara jelas mengenai perencanaan dan perancangan Sekolah Inklusi di Boyolali sebagai landasan dalam Desain Grafis Arsitektur.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi lapangan dan studi keputakaan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, dilakukan dengan pihak-pihak dengan topic permasalahan untuk mendapatkan data-data sebagai dasar perencana dan perancangan Sekolah Inklusi di Boyolali.
2. Observasi lapangan , dilakukan sebagai pengamatan langsung terhadap obyek agar didapat bahan perbandingan.
3. Studi pustaka, dilakukan untuk memperoleh data dan literature yang diambil dari media cetak maupun media elektronik.

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan synopsis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara garis besar tema utama dalam penyusunan landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur, yang di dalamnya meliputi latar belakan, tujuan dan sasaran pembahasan, manfaat, lingkup pembahasan, metode pembahasan dan pengumpulan data yang digunakan, serta kerangka pembahasan, metode pembahasan dan pengumpulan data yang digunakan, serta kerangka pembahasan yang berisi pokok-pokok pikiran tiap bab yang ada.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN STUDI BANDING

Meninjau tentang teori-teori sekolah inklusi yang dipakai untuk mendukung perencanaan dan perancangan Sekolah Inklusi di Boyolali, serta studi banding yang dilakukan di beberapa sekuah yang telah menerapkan sisitem pendidikan inklusi di Boyolali.

BAB III TINJAUAN KAWASAN

Berisi tentang tinjauan umum dan potensi Kabupaten Boyolali serta tinjauan Sekolah Inklusi di Boyolali berdasarkan studi literature dan studi banding.

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Merupakan uraian pendekatan perencanaan Sekolah inklusi dari beberapa aspek yang berkaitan dengan karakteristik, pelaku aktivitas, dan ruang-ruang yang dibutuhkan, fisiologi ruang, struktur bangunan serta kelengkapan bangunan. Pendekatan perancangan bangunan dengan pendekatan konsep Universal Desain.

BAB V KONSEP DAN PROGRAM PERANCANGAN

Berisi tentang rumusan hasil pembahasan analisi aspek-aspek perencanaan dan perancangan bangunan Sekolah Inklusi di Boyolali.

1.7. Alur Pikir

